

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah, maka baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk memberikan informasi yang dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sebuah entitas kepada publik atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada entitas tersebut. Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Tahun 2007 Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyajian Laporan Keuangan perlu diadakannya Keterandalan Pelaporan Keuangan yang harus disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Keterandalan Pelaporan Keuangan yaitu Informasi yang disajikan bebas dari bias dan kesalahan yang signifikan, menyatakan setiap fakta dengan jujur dan dapat dibuktikan kebenarannya (Renyowijoyo, 2010:21). Berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, dapat dijelaskan juga bahwa Keterandalan Pelaporan Keuangan yang berkualitas yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Penyusunan Keterandalan Pelaporan Keuangan akan membutuhkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan dapat memahami bagaimana proses serta pelaksanaan akuntansi itu dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Indriasari dan Nahartyo, 2018). Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) serta proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan (Desseler, 2015). Suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen mulai dari *planning*, *organizing*, *leading*, dan *controlling* dalam setiap aktivitas/fungsi operasional SDM mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi, transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrialisasi, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi

produktif dari SDM organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien (R. Supomo dan Eti Nurhayati, 2018).

Namun beberapa pelanggaran yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di negeri ini menunjukkan keterandalan pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya baik khususnya masalah keuangan pada pengelolaan aset. Padahal kapasitas sumber daya manusia sudah mengedepankan potensi pemanfaatan aset public dan sumber daya manusia yang sudah berkompeten (GalamediaNews.com).

Menurut Ketua DPC PKB KBB (Asep Dedi, 2019) Kapasitas Sumber Daya Manusia yang terjadi pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 bahwa kapasitas SDM di Kabupaten Bandung Barat sudah kompeten, akan tetapi dalam kenyatannya tidak cermat sehingga pelaporan keuangan tidak bisa diandalkan.

Faktor lain yang mendukung Keterandalan Pelaporan Keuangan yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pemanfaatan Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Sutabri, 2014:3). Penyusunan laporan keuangan yang telah terkomputerisasi dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih

akurat dan konsisten dibanding dengan sistem manual karena dapat membantu mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan yang disebabkan oleh *human error* serta dapat membantu menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi tersebut oleh pemerintah daerah juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, dimana Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Namun menurut Konsultan Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (Totok Amin Soefijanto, 2015) dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi yang baik dan sudah paham mengoperasikan komputer akan menghasilkan keterandalan pelaporan keuangan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak cermat dan kurang efisien dan efektif sehingga tidak andal dalam menyusun keterandalan laporan keuangan.

Adapun faktor lain yang mendukung Keterandalan Pelaporan Keuangan yaitu Akuntabilitas Publik. Akuntabilitas publik adalah suatu laporan yang dilakukan oleh instansi untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Basri, 2016:48). Akuntabilitas menuntut

pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap laporan keuangannya mulai dari perencanaan anggaran, pemakaian anggaran serta pelaporan anggaran secara penuh. Akuntabilitas terkait keterandalan pelaporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, dalam hal ini laporan yang andal mengandung informasi relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut (Stelconi, 2002) dalam Aliyah dan (Nahar,2012).

Namun menurut Dikdik selaku karyawan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bandung (2020), akuntabilitas publik yang efektif dapat dilihat melalui keterandalan pelaporan keuangannya yang diketahui dengan adanya pemberitahuan dari pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Masyarakat juga sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Akan tetapi pada kenyataannya Akuntabilitas Publik tidak cermat sehingga mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan yang diragukan.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan pada latar belakang penelitian ini maka menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian melalui skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dapat disimpulkan dan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya kasus keterandalan pelaporan keuangan yang diragukan dikarenakan kapasitas sumber daya manusia yang dianggap sudah berkompoten dalam kenyatan nya tidak cermat sehingga pelaporan keuangan tidak bisa diandalkan.
2. Adanya kasus keterandalan pelaporan keuangan yang diragukan dikarenakan pemanfaatan teknologi informasi yang dianggap seluruhnya sudah menguasai komputer dalam kenyatannya masih kurang menguasai sehingga pelaporan keuangan tidak bisa diandalkan.
3. Adanya kasus keterandalan pelaporan keuangan yang diragukan dikarenakan akuntabilitas publik yang dianggap sudah efektif dalam kenyataannya belum sepenuhnya efektif sehingga pelaporan keuangan tidak bisa diandalkan.

1.3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka diambil beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan?
2. Seberapa besar Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan?

3. Seberapa besar Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan?

1.4. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sehubungan dengan adanya wabah virus Covid-19, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Kebijakan *Work From Home* (WFH) yang didalamnya mencantumkan bahwa para karyawan diharuskan bekerja dirumah. Dengan adanya kebijakan mengenai wabah ini, maka berdampak bagi peneliti untuk melakukan penelitian dimana penelitian hanya bisa dilakukan pada satu perusahaan, dan belum bisa dilakukannya survey lapangan, maka informasi yang didapat pun terbatas.

1.5. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.5.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data informasi mengenai Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan.

1.5.2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ingin peneliti kaji, maka tujuan penelitian yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

1.6. Kegunaan Penelitian

1.6.1. Kegunaan Praktis

Untuk memecahkan masalah sebagaimana yang ada pada fenomena umum dan khusus, data sebagai tambahan informasi bermanfaat mengenai Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan.

1.6.2. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas publik, serta untuk pengembangan ilmu terkait dengan pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas public terhadap keterandalan pelaporan keuangan.